
Peran International Labor Right Forum dalam Kasus Kerja Paksa pada Pertanian Kapas di Uzbekistan 2007-2014

Vione Ramadhanty¹

¹Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 55183
rmdhnty@gmail.com

Abstract

This research attempts the role of ILRF in overcoming the case of forced labor in cotton agriculture of Uzbekistan 2007-2014. As an NGO that have goals to maintain justice for workers, ILRF has been involved in resolving the forced labor problem in Uzbekistan that directly controlled by the government. The government argues this is a form of community service. For this reason the government forces its people to work on cotton farming every year. Not only adults but children also become victims. The researcher used the concept of NGO and forced labor to analyze the role of ILRF which doing advocate by research, conducting data and information, organize coalition and doing the lobbying

Keyword: *The Role of ILRF, forced labor, Uzbekistan*

Abstrak

Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana peran International Labor Right Forum dalam menangani kasus kerja paksa pada pertanian kapas di Uzbekistan dari tahun 2007-2014. Sebagai sebuah NGO yang mempunyai tujuan untuk menegakkan keadilan bagi para pekerja, International Labor Right Forum ikut terlibat dalam mengatasi permasalahan kerja paksa di Uzbekistan. Permasalahan kerja paksa yang terjadi di Uzbekistan merupakan kasus yang unik karena dikendalikan langsung oleh pemerintah. Pemerintah beralasan bahwa hal ini sebagai bentuk bakti kepada negara. Dengan alasan ini pemerintah memaksa rakyatnya untuk bekerja pada pertanian kapas setiap tahunnya. Tidak hanya orang dewasa namun anak-anak juga turut menjadi korban. Peneliti menggunakan konsep NGO dan konsep forced labour untuk menganalisa peran International Labor Right Forum yang menggunakan praktik advokasi berupa penelitian dan pengumpulan data dan informasi, melakukan koalisi, melakukan lobi.

Kata Kunci : Peran ILRF, Kerja Paksa, Uzbekistan

PENDAHULUAN

International Labor Right Forum merupakan sebuah organisasi non-profit yang bergerak pada bidang advokasi. Organisasi ini didirikan pada tahun 1986 dan berpusat di Washington, D.C. Pada awal didirikannya, organisasi ini bernama *International Labor Rights Education & Research Fund*. Misi dari organisasi ini ialah “semua pekerja memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman dimana mereka diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, dimana mereka dengan bebas dapat mempromosikan hak dan kepentingan mereka”. Peran *International Labor Right Forum* adalah untuk membantu pekerja dalam memenangkan dan menegakkan perlindungan hak-hak dasar mereka dan meminta pertanggung jawaban dari pihak yang terkait. (International Labor Right Forum, 2014)

Sejak berdirinya di tahun 1986, *International Labor Right Forum* telah memperluas pengaruhnya ke berbagai kawasan. Tidak hanya menangani permasalahan yang terjadi di wilayah Amerika namun pengaruhnya meluas hingga benua Asia dan Afrika. Beberapa contoh keterlibatan *International Labor Right Forum* ialah pada kasus pekerja anak-anak pada perkebunan tembakau di Malawi, mendirikan Rugmark atau yang sekarang dikenal dengan GoodWeave International di India pada tahun 1994. *International Labor Right Forum* juga turut serta dalam memngkampanyakan masalah *Gender-based violence (GBV)* bersama organisasi internasional lainnya.

Keterlibatan ILRF dalam permasalahan terkait hak pekerja telah meluas hingga benua Asia, salah satu negara di Asia yang masih ditemukan adanya kerja paksa ialah Uzbekistan. Permasalahan yang terjadi di Uzbekistan ialah adanya praktik kerja paksa. Uzbekistan merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tengah dan merupakan salah satu dari negara terbesar yang berada di kawasan tersebut Secara geografis, letak negara ini sangat strategis karena terletak di tengah-tengah kawasan Asia Tengah. Selain itu, Uzbekistan juga berbatasan dengan semua negara yang ada di Asia Tengah.

Kerja paksa bukanlah sebuah permasalahan yang dapat dikatakan baru. Sejak dulu sistem kerja paksa telah banyak digunakan di beberapa negara. Hal ini terus berlanjut di era modern seperti saat ini, bukan tidak mungkin masih ada beberapa negara yang menerapkan sistem kerja paksa. Sebagai sebuah negara merdeka, Uzbekistan tentu membutuhkan devisa negara sebagai salah satu penunjang perekonomian. Dalam hal ini Uzbekistan mempunyai beberapa sektor utama dalam mensuplai perekonomiannya. Salah satu sektor utama devisa

negara Uzbekistan adalah sektor pertanian dengan salah satu tanaman utamanya ialah kapas. Di Uzbekistan, kapas mendapat julukan “*white gold*” dan dianggap sebagai *national treasure*. (Putz, 2016) Hal ini dibuktikan dengan Uzbekistan yang menjadi produsen kapas terbesar keenam dan eksportir terbesar ke-3 di dunia. (International Slavery Museum, 2011) Tercatat bahwa setiap tahunnya produksi kapas Uzbekistan mencapai 1 juta ton serat kapas dan menyumbang hampir 6% dari produksi kapas secara global. Kemudian pada tahun 2003-2007 Uzbekistan mengekspor sebanyak 4.447 juta ton serat kapas atau setara dengan 11% ekspor dunia. (International Cotton Advisory Committee, 2011)

Namun dibalik keberhasilan Uzbekistan sebagai negara penghasil kapas, ditemukan adanya pelanggaran HAM berupa kerja paksa yang ternyata telah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Dibawah kepemimpinan Presiden Islam Karimov sistem kerja paksa diberlakukan kepada rakyat Uzbekistan. Rakyat Uzbekistan dipersiapkan untuk bekerja saat musim panen atau disebut “*pahta*” (Doward, 2012). Pemerintah Uzbekistan beranggapan bahwa hal ini merupakan sebuah bukti yang menggambarkan komitmen untuk memajukan kemakmuran bangsa mereka. Hal ini berlangsung setiap tahun dimana pemerintah memaksa rakyat untuk menanam dan memanen kapas. Pemerintah juga menetapkan adanya kuota yang harus dipenuhi oleh rakyat saat memanen kapas.

Berdasarkan investigasi dan wawancara yang dilakukan oleh beberapa NGO dan media, rakyat Uzbekistan memberikan pernyataan bahwasanya pemerintah memaksa mereka untuk bekerja di pertanian kapas dan jika menolak maka mereka akan dihukum (Safo & Kremer, 2012). Tidak hanya orang-orang dewasa saja namun hal ini juga diberlakukan untuk anak-anak yang masih dibawah umur. Beberapa anak-anak yang berhasil di wawancarai menceritakan bagaimana kondisi barak atau tempat yang mereka tinggali selama bekerja untuk memetik kapas dimana dalam satu kamar terdapat 18 orang. Tidak ada fasilitas yang layak seperti listrik, jendela dan air untuk mereka. Untuk makan sehari-hari pun mereka harus membayar sendiri yang mana tergantung dari berapa jumlah kapas yang berhasil mereka panen pada hari itu. (Environmental Justice Foundation, 2005)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini yaitu metode kualitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data sekunder melalui studi pustaka, publikasi/buku, internet, atau media lainnya untuk menunjang penelitian dan mendapatkan sumber data.

LANDASAN TEORI

1. Konsep NGO (Non Governmental Organization)

Sejak perang dingin berakhir, telah muncul aktor-aktor baru yang mempengaruhi dunia Internasional. Salah satunya ialah NGO (Non Government Organization). Peran NGO (*Non Government Organization*) dalam perpolitikan global pun semakin berkembang dan keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja. Baik dari segi jumlah, ukuran, ataupun isu yang menjadi fokus bahasannya. Miller menyebutkan bahwa meningkatnya jumlah organisasi internasional setara dengan meningkatnya tingkat politik, ekonomi dan sosial sehingga hal ini membuktikan pentingnya NGO dalam ranah hubungan internasional. (Miller, 1998)

Menurut Tujil, NGO dapat didefinisikan sebagai organisasi non-profit, independent yang dapat meningkatkan kualitas dari mereka yang termajinalkan. Sedangkan PBB mendefinisikan NGO sebagai organisasi non-profit yang teroganisir baik dalam level lokal, nasional maupun internasional. NGO melakukan berbagai variasi pelayanan, membawa kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah dan juga memonitor kebijakan. NGO banyak membantu dalam hal menganalisis dan membantu untuk mengawasi penerapan kebijakan internasional. beberapa diantaranya terbentuk atas dasar isu spesifik seperti HAM, lingkungan maupun kesehatan. (Tujil, 1999)

Berdasarkan kegiatan utamanya, NGO dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu operasional dan advokasi. Maksud dari NGO operasional adalah NGO yang tujuan utamanya perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Sementara maksud NGO advokasi adalah NGO yang bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki akses untuk menyuarakan kepentingannya. (Teegen, Vachani, & Doh, 2004) Dalam praktiknya NGO melakukan menggunakan beberapa cara seperti:

1. Melakukan penelitian dan pengumpulan data.

Data merupakan alat yang penting dalam advokasi. Dengan mengumpulkan berbagai data dapat dijadikan landasan dalam menentukan langkah yang harus diambil terkait masalah yang diteliti. Data ini juga digunakan sebagai sumber informasi untuk mengatasi permasalahan atau kasus terkait.

2. Bekerja sama dengan aktor lain atau menggelar koalisi.

Koalisi dapat di definisikan sebagai gabungan beberapa organisasi atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dalam suatu waktu terkait isu

tertentu. Koalisi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan, menyebarkan informasi terkait isu dan juga diharapkan dapat mempermudah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

3. Melakukan lobi.

Lobi merupakan sebuah bentuk upaya yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pihak tertentu. Dengan melakukan lobi, diharapkan dapat menguntungkan kelompok tertentu dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Melakukan kampanye

Kampanye ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian dan dukungan publik dengan menggunakan simbol-simbol maupun peringatan tertentu.

5. Dalam beberapa kasus melakukan aksi yaitu demonstrasi.

Demonstrasi biasanya digunakan sebagai upaya terakhir yang dilakukan jika tuntutan yang ingin disampaikan tidak bisa dilakukan. (Hudson, 2002)

Berdasarkan pemaparan konsep NGO diatas dapat dilihat bahwa *International Labor Right Forum* termasuk dalam NGO yang kegiatan utamanya ialah advokasi. Dapat dilihat beberapa praktik dari advokasi yang dilakukan oleh *International Labor Right Forum* yaitu :

1. Penelitian dan pengumpulan data

Pada dasarnya *International Labor Right Forum* bukanlah NGO pertama yang meneliti permasalahan yang terjadi di Uzbekistan. Sejak tahun 1990-an beberapa aktivis HAM Uzbekistan telah mulai melaporkan kerja paksa yang terjadi. (Voa Direct Packages, 2015) Kemudian di tahun 2000-an mulailah beberapa aktor internasional mulai menaruh perhatian pada kasus ini, tepatnya di tahun 2002 dimana *Save the Children (UK)* melakukan penelitian di beberapa wilayah di Uzbekistan. Di tahun 2005 *Environmental Justice Foundation (EJF)* juga melakukan investigasi di Uzbekistan. (Kandiyoti, 2009). Selanjutnya di tahun yang sama *International Labor Right Forum* juga melakukan investigasi di Uzbekistan untuk memperkuat hasil investigasi yang dilakukan oleh EJF. (International Labor Right Forum, 2007)

2. Menggelar koalisi bersama

Dalam mengatasi permasalahan ini *International Labor Right Forum* bekerja sama dengan beberapa NGO yang memiliki latar belakang yang sama diantaranya ialah *Anti-Slavery International*, *Human Right Watch*, *Uzbek-*

German Forum for Human Rights, Boston Common Asset Management, Calvert Investment, dan National Retail Foundation. (Cotton Campaign, 2015)

3. Melakukan lobi

Yang dimaksud dengan lobi adalah usaha pendekatan yang dilakukan kepada pihak tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini koalisi gabungan *International Labor Right Forum* dan organisasi lainnya melakukan pendekatan kepada pemerintah Uzbekistan, pemerintah negara lain dan juga organisasi internasional yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan permasalahan kerja paksa ini. (International Labor Right Forum, 2014)

2. Konsep Forced Labour

Dalam Konvensi ILO tentang Forced Labour No. 29 tahun 1930, *forced labour* didefinisikan sebagai :

“semua pekerjaan atau jasa yang diminta dari siapapun dibawah ancaman denda dan untuk mana orang tersebut tidak pernah menawarkannya secara sukarela.”
(International Labour Organization, 2014)

Kemudian dalam *Forced Labour Protocol* (Article 1(3)) definisi ini ditegaskan kembali dan terdiri dari tiga elemen yaitu :

1. *Work*
2. Ancaman hukuman
3. *Involuntariness*

Terdapat istilah *“offered voluntarily”* yang mengacu pada kondisi dimana persetujuan antara pekerja dengan pimpinan dimana pekerja berhak untuk mengambil pekerjaan yang ditawarkan dan adanya kebebasan untuk berhenti. Hal yang terjadi justru pimpinan memberikan informasi palsu sehingga pekerja tidak mendapatkan haknya. (International Labour Organization, 2014)

ILO juga menyebutkan beberapa indikator untuk mengidentifikasi adanya kerja paksa, yaitu adanya ancaman atau kekerasan fisik, adanya pembatasan atau larangan bagi pekerja, tidak membayar upah pekerja yang bekerja untuk melunasi hutang, tidak membayar upah sama sekali ataupun memotong upah secara berlebihan, dan menyita dokumen identitas. (Skrivankova, 2010). Dalam *Universal Declaration of Human Rights* pasal 23 dan 24 juga telah disebutkan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas

syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, setiap orang yang bekerja pun berhak mendapatkan upah tanpa diskriminasi yang menjamin kesejahteraan dirinya serta keluarganya. Para pekerja ini juga dibebaskan untuk bergabung dengan serikat pekerja yang menjamin keamanannya dan juga berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala. (United Nations, 2015)

Berdasarkan pemaparan konsep kerja paksa diatas maka dapat dikatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Uzbekistan merupakan bentuk dari kerja paksa karena rakyat Uzbekistan dipaksa untuk bekerja di pertanian kapas dibawah paksaan dan juga ancaman dari pemerintah. Mereka tidak punya pilihan untuk menolak karena pemerintah mengancam dengan hukuman fisik.

PEMBAHASAN

Dinamika Permasalahan Hak Pekerja (Kerja Paksa) di Uzbekistan

Kerja paksa di Uzbekistan bukanlah sebuah permasalahan baru namun telah terjadi sejak negara ini masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Di masa itu, Uni Soviet yang berada dibawah pimpinan Stalin menerapkan sistem perekonomian terpusat yang membuat masyarakat tidak bebas dalam melakukan kegiatan perekonomian. Sistem ini membuat pemerintah memegang kendali lebih dalam mengatur perekonomian. (Ferreira, 2018)

Ketika Uzbekistan berhasil memperoleh kemerdekaannya di tahun 1991, praktik kerja paksa ini masih tetap berlanjut. Pasca kemerdekaannya, kondisi perekonomian negara Uzbekistan menjadi tidak stabil. Adanya peralihan sistem ekonomi dan juga Uni Soviet yang tidak lagi menyokong perekonomian negara menjadi penyebabnya. Di awal kemerdekaan banyak sektor ekonomi yang terhenti karena kurangnya dana. Disaat perekonomian masih tidak stabil kapas mampu bertahan untuk memenuhi kebutuhan negara. Kapas tetap menjadi komoditas utama bagi Uzbekistan. Meskipun jumlahnya yang dihasilkan tidak sebanyak saat era Uni Soviet namun kapas masih menjadi pendapatan utama bagi perekonomian Uzbekistan. Jumlah lahan yang ditanami kapas pun berkurang.

Di tahun 1990 tercatat sebanyak 1,8 juta hektar kemudian berkurang menjadi 1,4 juta hektar di tahun 2006. Hal ini dipicu adanya masalah yang disebabkan sistem monokultur dan juga untuk menghindari krisis pangan bagi rakyat Uzbekistan. sebab lainnya ialah masalah lingkungan yaitu kekeringan di Laut Aral dan polusi tanah yang disebabkan besarnya jumlah

irigasi dan pupuk yang diperlukan ladang kapas yang tersebar di seluruh wilayah Uzbekistan (FAO, 2012).

Dengan kapas, dapat membantu menghidupkan sektor perekonomian lainnya. Keberhasilan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Uzbekistan untuk tetap mempertahankan praktik kerja paksa. Tidak banyak perubahan antara praktik kerja paksa yang terjadi di era Uni Soviet dan pasca kemerdekaan. Yang menjadi perhatian ialah sistem kerja paksa yang justru menjadi lebih parah dari sebelumnya. Terlebih lagi, kasus kerja paksa yang terjadi di Uzbekistan merupakan sebuah kasus yang unik karena dalang dari kasus kerja paksa ini tidak lain ialah pemerintahnya sendiri. Kerja paksa ini dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat yang kemudian dibantu oleh pemerintah daerah.

Kapas mulai ditanam pada kisaran bulan April-Mei dan musim panen jatuh pada bulan September-November. Selama musim panen semua rakyat dipekerjakan di pertanian kapas. Pemerintah juga menetapkan kuota yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Di era ini anak-anak lebih banyak dipekerjakan oleh pemerintah. Tidak dapat dipastikan secara pasti berapa jumlah anak-anak yang dipekerjakan oleh pemerintah. Data yang diperoleh dari *Environmental Justice Foundation (EJF)* NGO yang berbasis di London memprediksi sekitar 200.000 anak-anak dipekerjakan di wilayah Ferghana. Berdasarkan data yang ada di UNICEF pada tahun 2000 terdapat sekitar 22,6% anak-anak yang berumur antara 5-14 tahun mulai bekerja memanen kapas meskipun hanya paruh waktu. Anak-anak ini adalah tenaga kerja murah. Beberapa bahkan tidak dibayar sama sekali. Alasan pemerintah menggunakan anak-anak sebagai tenaga kerja ialah agar pemerintah tidak perlu membayar mahal upah selama bekerja. (Kandiyoti, 2009)

Pada tahun 2009-2011 tercatat bahwa upah yang diterima para pekerja hanya sebesar 100-125 soum atau sekitar 3 sen perkilonya. Jumlah upah ini paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah yang mana memiliki tingkat pendapatan lebih rendah dari Uzbekistan. Di Tajikistan dan juga Kazakhstan upah yang diberikan dua kali lipat dibandingkan dengan Uzbekistan (10 sen). Jumlah upah yang dibayarkan juga menyesuaikan dengan kondisi kapas saat dipanen. Kapas yang dipetik saat periode pertama masa panen termasuk dalam kapas kelas satu dan mendapatkan upah paling besar. Semakin lama memetik kapas maka upah yang dibayarkan oleh pemerintah akan semakin berkurang.

Jumlah kuota yang harus dipenuhi oleh setiap anak berbeda-beda. Bagi anak-anak yang berusia lebih tua berkisar 50-60kg sedangkan usia yang lebih muda sekitar 10 kg. Ada hukuman yang menanti anak-anak ini jika mereka tidak berhasil mengumpulkan kapas sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Hukuman ini bisa berupa ancaman pengurangan nilai, tidak naik kelas bahkan dikeluarkan dari sekolah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sembilan provinsi di Uzbekistan yaitu Jizzakh, Fergana, Namangan, Syr Daria, Surkhandaria, Bukhara, Khorezm, Tashkent dan Samarkand bahwasanya pekerjaan memanen kapas biasanya dimulai pada minggu ketiga bulan September. Di penghujung bulan September, ketika memasuki musim hujan tekanan yang diberikan pemerintah semakin besar. Pemerintah berusaha untuk mengumpulkan kapas sebelum hujan turun. Di wilayah Samarkand, tidak hanya anak-anak sekolah dasar namun juga mahasiswa. Setiap hari saat musim panen, pemerintah daerah dan juga pihak sekolah secara bergantian mengunjungi ladang kapas guna memastikan anak-anak tersebut bekerja dengan benar dan memenuhi target panen. Anak-anak ini tidak bisa menolak, karena ada ancaman dan juga sanksi yang akan diberikan oleh pihak sekolah jika mereka menolak. Sanksi ini berupa nilai mereka diturunkan, dikeluarkan dari sekolah hingga dipukul.

Meskipun telah terjadi sejak lama, namun kasus ini baru mendapat perhatian publik pada sekitar akhir tahun 1990-an. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah agar kasus ini tidak didengar oleh publik. Banyak aktivis HAM yang berusaha untuk mengungkap kasus ini pada publik justru berakhir dipenjara oleh pemerintah. Tidak hanya aktivis namun juga awak media dan jurnalis yang berusaha memberitakan kasus kerja paksa di Uzbekistan. Kebebasan pers sangat dibatasi oleh pemerintah. Hampir semua media, baik media cetak maupun elektronik dikuasai oleh negara. Outlet media tidak boleh berdiri secara independen dan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Akibatnya apa yang dimuat oleh media sangat bertentangan dengan kenyataan yang terjadi. (Environmental Justice Foundation, 2005)

Ketika kasus ini mulai mendapatkan perhatian publik, pemerintah Uzbekistan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Pemerintah menyangkal bahwa terjadi kerja paksa yang dikendalikan oleh pemerintah. Mereka berdalih bahwasanya apa yang dilakukan rakyat ialah sebuah bentuk pengabdian seorang rakyat kepada negara. Mengutip ucapan presiden Islam Karimov saat itu bahwasanya kapas merupakan simbol dari kesucian. Orang yang mampu menanam kapas hanya orang yang mempunyai pikiran yang bersih dan jiwa yang indah.

Data yang didapatkan oleh *US Department of Agriculture* menyebutkan bahwa Uzbekistan tidak mengimpor kapas mentah. Pemerintah Uzbekistan memfasilitasi perusahaan yang mengolah kapas tersebut. Ketika selesai dipanen, perusahaan akan membeli kapas tersebut dari pemerintah dan kemudian mengolahnya menjadi benang, kain dan pakaian. Pemerintah Uzbekistan mempertahankan kontrol atas pasokan kapas ke semua perusahaan melalui kontrak penjualan melalui *Uzbeklegprom* atau *Association of State Cotton Enterprises* dan *Uzbekengilsanoat* atau *State-owned Joint Stock Company*. Melalui kontrak ini pemerintah memberikan keistimewaan kepada perusahaan yang menjadi mitranya salah satunya ialah *Daewoo International* dengan memberikan harga murah.

Menurut Departemen Hubungan Ekonomi Luar Negeri Uzbekistan, Perdagangan dan Investasi, perusahaan yang membangun fasilitas pemrosesan kapas di Uzbekistan menerima diskon 15% untuk harga serat kapas. Perusahaan yang setuju untuk sepenuhnya memproses kapas menjadi produk jadi dan mengekspor setidaknya mendapatkan diskon 80% dan 5% tambahan. Perusahaan juga menerima pembebasan pajak dan bea cukai insentif. (International Labor Right Forum, 2013)

1. Hukum dan Perjanjian di Uzbekistan

Pada Konstitusi dan Kode Perburuhan Uzbekistan telah disebutkan adanya larangan eksploitasi di sektor ekonomi. Dalam pasal 37 terdapat larangan melaksanakan kerja paksa kecuali sebagai sanksi yang ditetapkan dan disetujui oleh pengadilan. Dalam Kode Tenaga Kerja Uzbekistan disebutkan bahwasanya usia minimum bagi anak-anak untuk bekerja adalah 16 tahun. Meskipun dalam kondisi tertentu anak-anak di usia 14 tahun telah diperbolehkan untuk bekerja tetapi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yaitu bekerja setelah jam belajar atau diluar jam sekolah, melakukan pekerjaan yang ringan dan tidak membahayakan kesehatan maupun perkembangan moral serta mendapatkan izin dari orang tua maupun wali.

Sejak kemerdekaannya di tahun 1991, Uzbekistan telah menjadi anggota dari beberapa organisasi internasional seperti United Nation dan juga ILO. Uzbekistan menjadi anggota UN di tahun 1992 menyusul kemudian ILO di tahun yang sama. Kemudian, ketika berbicara mengenai permasalahan kerja paksa yang terjadi di negara ini, Uzbekistan sendiri telah meratifikasi beberapa konvensi yang berhubungan dengan masalah kerja paksa, diantaranya :

1. *UN Convention on the Rights of the Child* 1989 disetujui pada 23 Desember 2008.
2. *International Convention on Civil and Political Rights (Article 8)* diratifikasi pada 28 September 1995.
3. *ILO Minimum Age Convention* 1973, diratifikasi pada 06 Maret 2009.
4. *ILO Convention 182 on the Worst Forms of Child Labor*, diratifikasi pada 24 Juni 2008.
5. *ILO Abolition of Forced Labor Convention (No. 105)* 1957, diratifikasi pada 15 Desember 1997.
6. *ILO Forced Labor Convention (No. 29)* 1930, diratifikasi pada 13 Juli 1992 (ILO, 2012)

2. Dampak Kerja Paksa di Uzbekistan

Banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan oleh kerja paksa yang terjadi. Beberapa dampak yang dirasakan oleh rakyat Uzbekistan ialah pada sector Pendidikan dan juga kesehatan. Pada bidang Pendidikan, hampir semua rakyat yang dipekerjakan di pertanian kapas ialah mereka yang masih bersekolah. Mulai dari sekolah dasar hingga universitas.

Dengan kondisi sekolah yang ditutup selama dua bulan secara langsung anak-anak ini telah kehilangan kesempatan untuk mendapat pendidikan. Hal ini semakin dipersulit dengan adanya paksaan dari orang tua yang juga mendapatkan ancaman dari pemerintah. Para orang tua mendapatkan tekanan sehingga mereka tidak mempunyai pilihan lain selain meminta anak-anak mereka untuk bekerja di pertanian kapas.

Keadaan ini dapat menjadi lebih buruk bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Anak-anak yang tinggal di pedesaan tidak hanya bekerja di saat musim panen, namun juga ketika musim semi atau saat masa tanam. Pekerjaan mereka tidak hanya memanen kapas di saat panen namun juga menyiapkan ladang untuk ditanami kapas. Keadaan ini membuat anak-anak di pedesaan mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak di kota. Akses pendidikan di desa yang cukup sulit juga semakin membuat anak-anak di desa merasa mereka tidak mampu bersaing dengan anak-anak dikota

Pada dasarnya Pekerjaan di pertanian kapas merupakan sebuah pekerjaan yang berat dan juga berbahaya. Pekerjaan ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah dikerjakan oleh anak-anak. Kondisi ladang kapas dan juga cuaca sangat mempengaruhi kesehatan anak-

anak yang bekerja di ladang kapas. Kondisi ladang kapas dan juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap makanan dan juga kelayakan tempat tinggal membuat para pekerja rentan terkena penyakit terutama mereka yang masih anak-anak.

Tabel 1.1 Dampak Kerja Paksa pada Kesehatan

No	Masalah Kesehatan	Jumlah	Persentase
1.	Sakit Punggung	21	52.5%
2.	Nyeri sendi	28	70%
3.	Masalah pernapasan	19	47.5%
4.	Sakit pada tungkai	9	22.5%
5.	Cedera otot	16	40%

Sumber: Child Labour in the Cotton Industry of Uzbekistan: a sociological study

Advokasi International Labor Right Forum dalam Kasus Kerja Paksa di Uzbekistan

1. Pengumpulan Data dan Penelitian

Sebelum ILRF turut terlibat dalam kasus kerja paksa di Uzbekistan, telah ada beberapa NGO lain yang telah lebih dulu melakukan penelitian terhadap kasus kerja paksa Uzbekistan. Fokus kerja ILRF yang berkaitan dengan hak-hak pekerja membuat ILRF tergerak untuk ikut terlibat dalam kasus kerja paksa ini. Terlebih kasus kerja paksa di Uzbekistan merupakan kasus yang unik. Keunikannya terletak pada pemegang kendali dari praktik kerja paksa yaitu pemerintah. Tercatat sejak tahun 1990-an beberapa aktivis HAM Uzbekistan telah mulai melaporkan kerja paksa yang terjadi namun kurang mendapatkan atensi dari dunia internasional (Voa Direct Packages, 2015)

Kemudian pada sekitar tahun 2000-an, kasus ini mulai menarik perhatian dunia internasional dan beberapa NGO internasional mulai melakukan penelitian dan menyelidiki kasus ini. tepatnya di di tahun 2002 NGO *Save the Children (UK)* mulai melakukan penelitian terhadap kasus ini di beberapa wilayah di Uzbekistan. Di tahun 2005 *Environmental Justice Foundation (EJF)* juga melakukan investigasi di Uzbekistan. (Kandiyoti, 2009). Selanjutnya di tahun yang sama *International Labor Right Forum* mulai melakukan investigasi di Uzbekistan untuk memperkuat hasil investigasi yang dilakukan oleh EJF.

Sejak keterlibatannya pada tahun 2005, secara aktif ILRF selalu mempublikasikan hasil penelitiannya secara rutin pada web resmi mereka yaitu www.laborrights.org. Dalam web tersebut disampaikan secara rinci perkembangan organisasi, perkembangan kasus kerja paksa

yang terjadi di Uzbekistan dan juga kasus terkait pekerja yang melibatkan ILRF didalamnya. Selain mempublikasikan di situs resminya, ILRF juga secara aktif memanfaatkan sosial media dalam menyebarkan informasi. Sosial media yang dimanfaatkan oleh ILRF ialah twitter dan facebook.

2. Menggelar Koalisi

Koalisi *International Labor Right Forum* dan berbagai aktor ini terbentuk pada tahun 2007 dengan nama *Cotton Campaign* dan ILRF menjadi koordinator dari koalisi gabungan tersebut. Secara rutin, *Cotton Campaign* menyampaikan informasi terkait perkembangan kasus kerja paksa dan juga kegiatannya pada kasus di Uzbekistan pada website resminya yaitu www.cottoncampaign.org/ (Cotton Campaign, 2015)

Sejak terbentuk di tahun 2007, *Cotton Campaign* telah mengadvokasi perusahaan dan juga beberapa organisasi internasional untuk menggunakan pengaruhnya dengan tujuan menghentikan kerja paksa pada pertanian kapas Uzbekistan. Beberapa perusahaan besar yang disoroti diantaranya ialah H&M, Daewoo International dan juga terdapat bank regional yaitu Asian Development Bank.

a. H&M

Pada kasus H&M, mengutip pernyataan dari pihak H&M bahwa perusahaannya telah melarang penggunaan kapas Uzbekistan dalam produknya. Hal ini juga dikomunikasikan kepada semua pemasok H&M. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya H&M dengan *Better Cotton Initiative and Textile Exchange* yang merupakan sebuah organisasi non-profit pada tahun 2004. Namun, di tahun 2009 majalah *Independent World Report* mengungkapkan bahwa salah satu pemasok H&M yang berada di Bangladesh adalah kapas mentah yang berasal dari Uzbekistan.

Anti Slavery International salah satu anggota *Cotton Campaign* meminta kepada H&M untuk melacak darimana kapas yang mereka gunakan. Selain itu, para aktivis menginginkan perusahaan untuk menambahkan pernyataan ke dalam semua kontrak, perjanjian vendor yang melarang pemasok melakukan bisnis apa pun dengan perusahaan lain yang beroperasi di Uzbekistan. H&M menjawab permintaan Anti-Slavery International bahwa kebijakan yang berisi larangan penggunaan kapas Uzbekistan untuk pemasok mereka telah dimulai. Mulai tahun 2010, H&M mengatakan bahwa perusahaan telah meminta semua pemasok garmen mereka di Bangladesh untuk menyatakan dari mana

kapas, benang dan kain yang digunakan untuk setiap pesanan H&M berasal (*Anti Slavery International*, 2013). Keseriusan H&M dibuktikan dengan turut serta bergabung menandatangani *Cotton Pledge* (Uzbekistan) di tahun 2011. *Cotton Pledge* merupakan sebuah perjanjian yang diusung oleh *Responsible Sourcing Network* yang juga merupakan bagian dari *Cotton Campaign* (*Responsible Sourcing Network*, 2012)

Meskipun telah menandatangani *Cotton Pledge*, pada tahun 2012 *Cotton Campaign* mengungkapkan bahwa H&M masih bekerja sama dengan *Daewoo International*. Tindakan H&M yang masih bekerja sama dengan Daewoo mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, terutama *Cotton Campaign* yang meminta H&M serius untuk mengimplementasikan *Cotton Pledge* yang sudah disetujui. *Cotton Campaign* juga meminta H&M secara tegas berhenti untuk bekerja sama dengan Daewoo Internasional. Selanjutnya, di tahun 2013 *Cotton Campaign* meminta H&M untuk menerapkan protokol Daewoo untuk mencegah kapas Uzbekistan kembali digunakan dalam produk H&M.

Menanggapi hal ini, H&M akhirnya mengambil langkah lebih lanjut untuk menghentikan produknya dikaitkan dengan kerja paksa di Uzbekistan. Kebijakan H&M mengharuskan semua suppliernya untuk turut serta menandatangani perjanjian yang mana menyetujui untuk berhenti menggunakan kapas Uzbekistan. H&M juga meminta 300 supplier utamanya berhenti membeli kapas Uzbekistan. H&M juga berkomitmen untuk memutus kontrak kerja dengan supplier yang masih memasok kapas Uzbekistan. selanjutnya H&M juga berencana untuk melakukan pemeriksaan secara acak untuk memastikan suppliernya mematuhi kebijakan tersebut. Pihak H&M menyebutkan bahwa di tahun 2013 telah mengalokasikan 850.000 Euro yang akan digunakan untuk pelatihan petani kapas untuk mematuhi prinsip dan kriteria BCI dalam hal sosial dan ketahanan lingkungan. (*Cotton Campaign*, 2013)

b. Daewoo International

Daewoo International merupakan sebuah perusahaan yang berpusat di Korea Selatan. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan dan konstruksi. Daewoo International sendiri telah berada di Uzbekistan sejak tahun 1996. Daewoo International saat ini terikat kontrak dengan tiga perusahaan tekstil lokal Uzbekistan. Tiga perusahaan tekstil tersebut ialah *Daewoo Textile Bukhara LLC*, *Daewoo Textile Fergana LLC* dimana Daewoo

International memiliki saham 100% dan Global Komsco Daewoo dengan saham sebanyak 35%.

Sejak tahun 2012, *Cotton Campaign* telah melakukan kontak dengan pihak Daewoo International bertujuan untuk membahas keterlibatan Daewoo International dalam kasus kerja paksa Uzbekistan. Sayangnya Daewoo International menolak permintaan dari Cotton Campaign untuk membantu mengawasi dan jika diperlukan menghentikan praktik kerja paksa. Kemudian pada 12 Desember 2012, Daewoo International menghadiri pertemuan di Seoul bersama ILO dan juga *Cotton Campaign*. Dalam pertemuan ini *Cotton Campaign* meminta Daewoo International untuk membentuk sebuah kelompok yang bertujuan memantau kegiatan kerja paksa di Uzbekistan tanpa memberitahu pada pemerintah Uzbekistan. Dalam pertemuan ini terjadi perbedaan pendapat antara pihak *Cotton Campaign* dan Daewoo International sehingga tidak menghasilkan kesepakatan. (Daewoo International, 2014)

Daewoo merupakan perusahaan yang dimiliki oleh anggota United Nation Global Compact dan POSCO. Daewoo juga berpusat di Korea Selatan yang merupakan anggota *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*. Melihat hal ini seharusnya Daewoo memiliki tanggung jawab untuk menghindari berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia. *Cotton Campaign* kemudian berusaha untuk mengajukan permintaan kepada OECD untuk membantu memberikan peringatan kepada Daewoo International. (Daewoo International, 2014)

Pada 19 Februari 2013, *Business and Human Rights Resource Centre* mengundang Daewoo International untuk memberikan respon terhadap usaha Cotton Campaign yang meminta H&M untuk serius memutuskan kontrak dengan Daewoo International mengingat perusahaan ini secara tidak langsung turut mensupport kerja paksa di Uzbekistan sebagai pemilik saham. Dalam pertemuan ini, pihak Daewoo International mengakui bahwa mereka masih membeli kapas dari Uzbekistan. Daewoo International beralasan bahwa sebagai perusahaan swasta mereka tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun pihak Daewoo International juga berjanji akan terus melakukan kontak dengan pihak Cotton Campaign maupun ILO untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Daewoo International menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk membantu menangani masalah kerja paksa ini. Daewoo International secara rutin

melakukan komunikasi dengan pemerintah Uzbekistan untuk meminta pemerintah menangani kerja paksa yang terjadi. Selanjutnya pada 11 Maret 2013, pihak Daewoo International mengungkapkan bahwa mereka telah mencoba untuk mengirimkan surat melalui *Daewoo Textile Fergana LLC* kepada pemerintah Uzbekistan agar menyetujui permintaan independent monitoring yang diajukan oleh Daewoo. Ketika menteri Mr. Ilkhom U.Khaydarov berkunjung ke kantor Daewoo International, pihak Daewoo International terus menyinggung permasalahan kerja paksa dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang serius. Mr. Ilkhom U.Khaydarov memastikan bahwa pemerintah Uzbekistan sedang dalam proses dan berusaha untuk dapat menyelesaikan permasalahan kerja paksa di Uzbekistan. (Daewoo International, 2014)

c. Asian Development Bank

Sejak berdirinya, *Asian Development Bank* telah banyak membantu dalam perekonomian berbagai negara baik itu kawasan Asia maupun lainnya. Kerjasama yang terjalin antara ADB dan juga Uzbekistan dimulai pada tahun 1996. Dimana saat itu kondisi perekonomian Uzbekistan masih tidak stabil pasca kemerdekaan. Dalam hal ini ADB berperan cukup penting dalam membantu Uzbekistan meningkatkan perekonomiannya. Proyek pertama yang dilakukan oleh ADB dan juga pemerintah Uzbekistan adalah mencetak buku-buku pelajaran dengan harga murah untuk kemudian di distribusikan ke seluruh daerah Uzbekistan. (Asian Development Bank, 2016)

Sejak tahun 2006, ADB berprinsip untuk berupaya dalam penghapusan kerja paksa dalam setiap kegiatannya. Namun pada tahun 2011, ADB dan pemerintah Uzbekistan berencana untuk melakukan kerjasama melalui proyek *Amu Bukhara Irrigation System* (ABIS), proyek yang mendukung irigasi bagi pertanian di Uzbekistan. Ketika *Cotton Campaign* membaca draft perencanaan dalam proyek ini, mereka menemukan bahwa ADB sekali tidak menyinggung permasalahan kerja paksa yang mana seperti kita ketahui merupakan masalah utama dalam sektor pertanian Uzbekistan. Meskipun telah mendapatkan teguran, pihak ADB tetap melanjutkan proyek ini tanpa perlindungan yang memadai. (Ferghana News, 2013). Pada tahun 2013, *Cotton Campaign* akhirnya mengirimkan surat kepada Presiden *Asian Development Bank*, Takehiko Nakao, guna menindak lanjuti kembali proyek tersebut.

3. Lobi International Labor Right Forum terhadap Pemerintah

Lobi merupakan sebuah bentuk upaya yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan melakukan lobi, diharapkan dapat menguntungkan kelompok tertentu. Berbicara mengenai kasus kerja paksa di Uzbekistan, kegiatan lobi yang dilakukan oleh ILRF lebih fokus kepada pemerintah.

a. Pemerintah USA

Cukup sulit untuk mengidentifikasi kapas Uzbekistan yang masuk ke pasar USA karena kapas Uzbekistan yang masuk ke pasar Amerika Serikat bukan sebagai bahan mentah namun telah diolah menjadi produk textile yang mana pengolahan itu berada di negara lain. Jadi dapat dikatakan USA secara tidak langsung merupakan pembeli terbesar dari kapas yang dihasilkan oleh Uzbekistan.

Uzbekistan merupakan salah satu negara yang mendapatkan kesempatan dari GSP. *Generalized System of Preferences (GSP)* adalah sebuah program yang memberikan kesempatan bagi negara-negara dengan tingkat perekonomian rendah untuk dapat meningkatkan perekonomian dengan cara membebaskan bea masuk bagi barang-barang yang diimpor. Di tahun 2007, ILRF mengirimkan surat kepada United States Trade Representative yang berisikan permintaan untuk meninjau dan menindak lanjuti status Uzbekistan pada program GSP tersebut (International Labor Right Forum, 2007). Menurut ILRF Uzbekistan telah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh GSP.

Selanjutnya pada April 2013, ILRF yang diwakili oleh Brian Campbell menghadiri pertemuan dengan *House Committee on Foreign Affairs* dalam *Hearing on Tier Rankings in the Fight Against Human Trafficking* untuk membahas Tariff Act 1930. Mengacu pada Tariff Act of 1930, bahwa *U.S. Customs Service* seharusnya menolak barang-barang yang dihasilkan dengan proses kerja paksa. Hal ini berkaitan dengan masih ditemukannya barang-barang yang berbahan dasar kapas yang berasal dari Uzbekistan. Perwakilan dari *House Committee on Foreign Affairs* menyatakan bahwa hal tersebut cukup sulit dilakukan mengingat kapas yang masuk ke pasar Amerika ialah kapas yang telah diolah menjadi barang siap pakai. (International Labor Right Forum, 2013)

Selanjutnya pada 29 April 2014, Brian Campbell memberikan kesaksiannya dihadapan *US House of Representative's Foreign Affairs Committee* tentang kerja paksa pada pertanian kapas di Uzbekistan yang terjadi secara terus menerus dan sistematis.

b. Pemerintah Uzbekistan

Pada tanggal 15 Agustus 2008, ILRF bersama dengan pemegang saham di U.S serta beberapa aktivis HAM menuntut agar pemerintah Uzbekistan berhenti mempekerjakan anak-anak di pertanian kapas. Mereka bersama-sama mengajukan banding kepada Presiden Islam Karimov, Direktur Jenderal Juan Somavia, Ketua International Labor Organization (ILO), dan Sekretaris Negara AS Condoleezza Rice. Perwakilan dari organisasi perdagangan juga akan menemui duta besar Uzbekistan untuk Amerika membicarakan masalah yang sama.

Di awal tahun 2008, para investor telah mulai melakukan pelacakan terhadap sumber kapas yang mereka gunakan. Mereka juga mengirim surat ke berbagai perusahaan yang tersebar di Amerika Utara, Eropa dan Asia yang memproduksi produk berbahan kapas guna mengetahui darimana kapas tersebut berasal (International Labor Right Forum, 2008)

Sebagai hasilnya karena terus mendapat kecaman dari berbagai pihak baik dari NGO maupun pemerintah maka Uzbekistan akhirnya mengurangi penggunaan tenaga kerja anak-anak dibawah 16 tahun di tahun 2012 dan bersedia untuk mengizinkan ILO melakukan monitoring di negaranya pada tahun 2013. Sebenarnya sejak tahun 2009 ILO telah berusaha untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah Uzbekistan terkait kasus kerja paksa ini. Sayangnya, meskipun jumlah penggunaan tenaga kerja anak mengalami penurunan tidak serta merta menghentikan pemerintah untuk terus memobilisasi rakyat. Berkurangnya anak-anak yang dipekerjakan di pertanian kapas justru membuat jumlah orang dewasa semakin meningkat. Begitu juga dengan monitoring yang dilakukan oleh ILO. Meskipun mendapatkan izin dari pemerintah namun gerakannya tetap dibatasi (Campbell, 2014)

KESIMPULAN

Kerja paksa adalah kondisi dimana seseorang melakukan suatu pekerjaan dibawah ancaman, baik ancaman verbal maupun secara fisik atau dengan kata lain tidak dilakukan dengan sukarela. Sejak berdirinya organisasi ini, ILRF telah banyak berperan dalam memperjuangkan keadilan bagi para pekerja. organisasi ini berupaya agar semua pekerja yang ada di seluruh dunia mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya

Peran ILRF pada kasus kerja paksa yang terjadi di Uzbekistan memang belum dapat dikatakan tuntas. Namun dapat dilihat bahwasanya ILRF telah banyak melakukan upaya untuk

menghentikan kerja paksa yang terjadi. Dapat dilihat pada tahun 2012 pemerintah Uzbekistan mengurangi penggunaan anak-anak pada kerja paksa. Di tahun yang sama, koalisi ILRF berhasil membuat kurang lebih 100 brand dan perusahaan multi nasional untuk menandatangani pernyataan dimana mereka bersedia untuk tidak menggunakan kapas yang berasal dari Uzbekistan. Hingga saat ini pun ILRF masih terus aktif memperjuangkan praktik kerja paksa yang terjadi di Uzbekistan dapat dihilangkan.

REFERENCES

- Anti Slavery International. (2013, April 18). Retrieved September 10, 2019, from <https://www.antislavery.org/>: <https://www.antislavery.org/cotton-crimes-hm-success-call-nike-end-complicity-uzbekistans-slavery/>
- Asian Development Bank. (2016, Januari 19). Retrieved Oktober 16, 2019, from Adb.org: <https://www.adb.org/about/history>
- Ataman, M. (2003). The Impact of Non-State Actors on World Politics: A Challenge to Nation-States. *Alternatives: Turkish Journal of International Relations*, 2, 42. Retrieved October 10, 2018, from <http://alternatives.yalova.edu.tr/article/view/5000159485/5000143919>
- Campbell, B. (2014, April 29). Retrieved from International Labor Right Forum: https://laborrights.org/sites/default/files/written_testimony_JTIP-Tier-Ranking-Hearing_29April2014.pdf
- Cotton Campaign. (2013, Februari 2). Retrieved September 15, 2019, from <http://www.cottoncampaign.org>: <http://www.cottoncampaign.org/blog/cotton-campaign-calls-on-hm-to-implement-the-daewoo-protocol>
- Cotton Campaign. (2015, Juni 13). *To end forced and child labor in the cotton fields of Uzbekistan and Turkmenistan*. Retrieved Juni 07, 2018, from Cotton Campaign: <http://www.cottoncampaign.org>
- Cotton Campaign. (2015, April 12). *Who we are*. Retrieved November 20, 2018, from Cotton Campaign: <http://www.cottoncampaign.org/who-we-are.html>
- Daewoo International. (2014, Agustus 4). Retrieved September 20, 2019, from business-humanrights.org: http://business-humanrights.org/sites/all/modules/fb_components/ajax/sites/default/files/documents/2014_08%20daewoo%20response%20uzbekistan.pdf
- Daewoo International. (2014, September 24). Retrieved Oktober 2, 2019, from business-humanrights.org: http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/2014_09%20daewoo%20response%20cotton%20campaign%20uzbekistan.pdf
- Daewoo International. (2014, September 24). Retrieved September 30, 2019, from https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/2014_09%20daewoo%20response%20cotton%20campaign%20uzbekistan.pdf

- Doward, J. (2012, December 15). *H&M comes under pressure to act on child-labour cotton*. Retrieved Juni 06, 2018, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/business/2012/dec/15/cotton-child-labour-uzbekistan-fashion>
- Environmental Justice Foundation. (2005, Desember 31). *White Gold : the True Cost of Cotton*. Retrieved Januari 01, 2019, from Environmental Justice Foundation: <https://ejfoundation.org/reports/white-gold-the-true-cost-of-cotton>
- Environmental Justice Foundation. (2005). *White Gold: the true cost of cotton*. London.
- FAO. (2012). Retrieved Agustus 18, 2019, from Fao.org: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/UZB/UZB-CP_eng.pdf
- Ferghana News. (2013, September 15). *Ferghana News*. Retrieved Oktober 20, 2019, from HRW urges ADB refrain irrigation financing in Uzbekistan over child labor: <http://enews.ferghananews.com/news.php?id=2709>
- Ferreira, K. (2018, Maret 2018). Retrieved from <https://medium.com/theciao/forced-labor-in-the-cotton-industry-of-uzbekistan-and-the-violation-of-human-rights-ce2b59efbc6c>
- Hudson, A. (2002). Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. *Advocacy by UK-Based Development NGOs*, 31, 402-418. doi:10.1177/0899764002313005
- ILO. (2012, Juli 20). Retrieved September 12, 2019, from ILO: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNT_RY_ID:103538
- International Cotton Advisory Committee. (2011). Retrieved Oktober 2, 2018, from International Cotton Advisory Committee: https://www.icac.org/econ_stats/country_fact_sheets
- International Labor Right Forum. (2007, Juni 21). *Request for Review of The GSP Status of The Republic of Uzbekistan for Violations of Worker Rights*. Retrieved November 30, 2018, from <https://laborrights.org/publications/request-review-gsp-status-republic-uzbekistan-violations-worker-rights>
- International Labor Right Forum. (2008, Agustus 15). Retrieved from <https://laborrights.org/https://laborrights.org/releases/social-investors-and-human-rights-activists-pressure-government-uzbekistan>
- International Labor Right Forum. (2013, April 30). Retrieved Oktober 26, 2019, from https://laborrights.org/https://laborrights.org/sites/default/files/publications/Exhibit%20A-Memorandum_in_Support_of_Excluding_Cotton_Products_DaewooIntl_and_Indorama_30April2013.pdf
- International Labor Right Forum. (2013, April). Retrieved from laborrights.org/https://laborrights.org/publications/tariff-act-complaint-ilrf-calls-us-customs-service-halt-imports-forced-labor-cotton

- International Labor Right Forum. (2014, Februari 28). *Cotton Industries*. Retrieved November 30, 2018, from International Labor Right Forum: <https://laborrights.org/industries/cotton>
- International Labor Right Forum. (2014, Februari 28). *History of International Labor Right Forum*. Retrieved Oktober 02, 2018, from International Labor Right Forum: <https://laborrights.org/about/history>
- International Labor Right Forum. (n.d.). *About ILRF*. Retrieved Oktober 2, 2018, from International Labor Right Forum: <https://laborrights.org/about/history>
- International Labour Organization. (2014). *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan/Kantor Perburuhan Internasional*. Jakarta: ILO Publication.
- International Labour Organization. (2014, Maret 10). *The meanings of Forced Labour*. Retrieved Oktober 2, 2018, from International Labour Organization: https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_237569/lang--en/index.htm
- International Slavery Museum. (2011, September 07). *Uzbekistan: cotton and the crushing of a nation*. Retrieved Oktober 10, 2018, from International Slavery Museum: <http://www.liverpoolmuseums.org.uk/ism/exhibitions/whitegold/uzbekistan.aspx>
- Kandiyoti, D. (2009). *Invisible to the world? The Dynamics of Forced Child Labour in the Cotton Sector of Uzbekistan*. London: The School of Oriental and African Studies. Retrieved November 23, 2018, from <https://www.soas.ac.uk/ccac/events/cotton-sector-in-central-asia-2005/file49842.pdf>
- Miller, L. H. (1998). *Global Order: Values and Power in International Politics*. Boulder, Colo: Boulder, Colo. : Westview Press.
- Putz, C. (2016, April 01). Retrieved Oktober 10, 2018, from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/04/uzbekistan-white-gold-dirty-business/>
- Responsible Sourcing Network. (2012, November 1). Retrieved September 20, 2019, from <https://www.sourcingnetwork.org>: <https://www.sourcingnetwork.org/blog/2012/11/1/over-100-powerhouse-apparel-brands-and-companies-have-signed.html>
- Safo, I., & Kremer, W. (2012, October 16). *Doctors and nurses forced to pick cotton*. Retrieved Juni 06, 2018, from BBC News: <https://www.bbc.com/news/magazine-19931639>
- Skrivankova, K. (2010, November). *Between decent work and forced labour: examining the continuum of exploitation*. Retrieved November 02, 2018, from https://aa.ecn.cz/img_upload/6334c0c7298d6b396d213ccd19be5999/forced-labour-exploitation-full.pdf
- Teegen, H., Vachani, S., & Doh, P. J. (2004). The Importance of Nongovernmental Organizations (Ngos) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda. *Journal of International Business Studies*, 5-7. Retrieved Desember 1, 2018, from https://www.researchgate.net/publication/5223115_The_Importance_of_Nongovernm

ental_Organizations_Ngos_in_Global_Governance_and_Value_Creation_An_International_Business_Research_Agenda

Tujil, P. v. (1999). NGOs and Human Rights : sources of justice and democracy. *Journal of International Affairs*, 495. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/24358050>

United Nations. (2015, November 24). *Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved November 30, 2018, from United Nations: http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf

Voa Direct Packages. (2015, Oktober 27). *Cotton Campaign: The goal is to end forced labor in Uzbekistan*. Retrieved from VOA: <https://www.amerikaovozi.com/a/cotton-campaign-uzbekistan-interview/3021362.html>